

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu persoalan utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia, meskipun negara ini telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil sepanjang dekade terakhir. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi tidak selalu mencerminkan pemerataan kesejahteraan, sebagaimana tersirat dari dinamika distribusi pendapatan yang masih timpang di berbagai segmen masyarakat. Ketimpangan pendapatan yang tinggi memiliki implikasi luas, mulai dari meningkatnya ketidaksetaraan kesempatan pendidikan dan layanan kesehatan, hingga potensial menimbulkan instabilitas sosial dan hambatan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Oktaviani, et al,2025).

Ketimpangan pendapatan juga merupakan isu fundamental dalam studi ekonomi pembangunan yang acap kali sulit diatasi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana tingkat ketimpangan distribusinya masih tergolong tinggi (Febriyani & Ali, 2021) Meskipun pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali menjadi tujuan utama, hal tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan keadilan dan kemakmuran yang merata, bahkan dapat memicu peningkatan ketimpangan pendapatan (Rohman & Suryanto, 2023). Permasalahan ini tercermin dari disparitas pertumbuhan ekonomi antar Kawasan Barat dan Timur Indonesia, yang menyoroti perlunya perhatian terhadap aspek distribusi dan pemerataan hasil pembangunan agar dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat (Anshari et al., 2019).

Secara teoritis, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan telah menjadi subjek diskusi panjang dalam literatur ekonomi pembangunan. Menurut hipotesis Kuznets yang dikutip dalam literatur ekonomi pembangunan, pada tahap awal proses pembangunan ekonomi ketimpangan pendapatan cenderung meningkat akibat perubahan struktur ekonomi. Namun pada tahap perkembangan yang lebih maju, ketimpangan tersebut diperkirakan akan menurun seiring meningkatnya pemerataan kesempatan ekonomi. Bukti empiris kontemporer menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mengurangi ketimpangan secara otomatis, terutama jika pertumbuhan tersebut tidak disertai dengan kebijakan redistribusi yang efektif atau peningkatan akses bagi kelompok berpendapatan rendah.

Ketimpangan merupakan fenomena yang kerap terjadi pada negara berkembang, termasuk Indonesia. Bentuk ketimpangan dapat muncul dalam berbagai aspek pembangunan seperti distribusi pendapatan, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan ekonomi antar kelompok masyarakat (Agusta, 2014). Ketimpangan yang semakin besar menyebabkan berbagai masalah diantaranya adalah meningkatnya angka kriminalitas, meningkatnya imigrasi yang nantinya akan berpengaruh pada ketidakstabilan dalam perekonomian. Akan tetapi pada tahap berikutnya akan semakin membaik.

Ketimpangan pendapatan di Indonesia memang masih menjadi isu struktural yang utama dalam pembangunan, di mana pertumbuhan ekonomi tidak selalu berkorelasi lurus dengan pemerataan kesejahteraan. Meskipun ekonomi tumbuh, manfaatnya sering kali tidak terdistribusi secara merata, yang tergambar melalui indikator Gini Ratio. Salah satu masalah yang kerap dialami negara-negara di dunia yaitu terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan antarkelompok

masyarakat. Tidak hanya negara berkembang, negara maju juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan yang terjadi dapat memunculkan dampak lanjutan bagi keberlangsungan pembangunan suatu negara, khususnya di bidang ekonomi (Ayu et al., 2022).

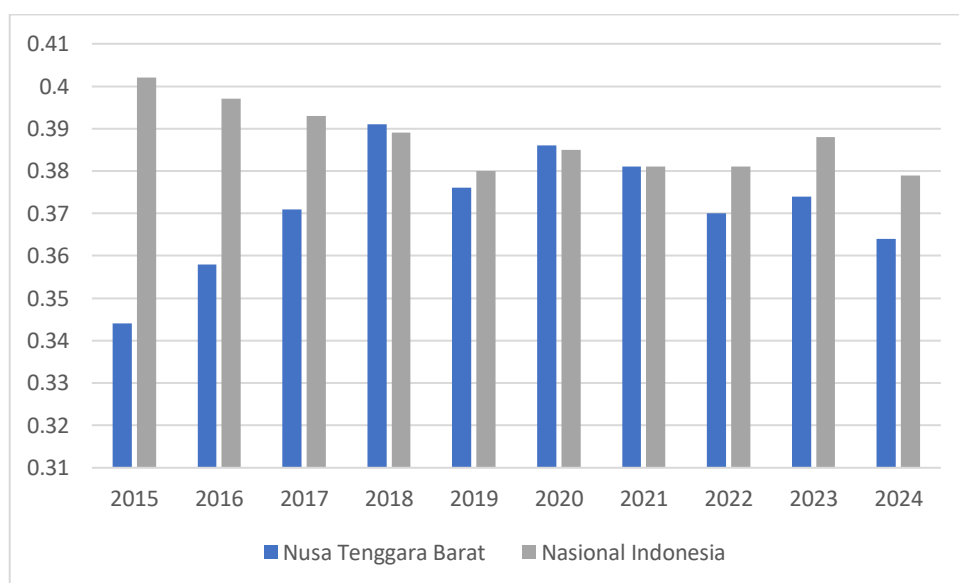
Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa periode belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Dengan kata lain masih ada kesenjangan dari aspek pendapatan. Bambang menyebutkan setidaknya ada empat hal yang mendorong terjadinya ketimpangan. Keempat hal itu adalah timpangnya akses layanan dasar, kualitas pekerjaan, pendapatan dan aset, serta rendahnya jaring pengaman. "Jadi pemerintah masih harus mengintervensi (tekan ketimpangan)," kata Bambang dalam diskusi di Jakarta, Jumat, 8 September 2017.

Dalam banyak studi, ketimpangan pendapatan diukur menggunakan Gini Ratio, yang menjadi indikator utama untuk menilai seberapa merata pendapatan dibagi di antara populasi suatu wilayah. Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih besar. Data Gini Ratio di Indonesia secara resmi dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik dan mencerminkan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami moderat penurunan ketimpangan pada beberapa periode, angka Gini Ratio nasional tetap menunjukkan posisi ketimpangan yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi negara berkembang.

Selain ketimpangan pendapatan pada level nasional, fenomena kesenjangan juga terlihat jelas di tingkat provinsi, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa distribusi pendapatan antar wilayah di NTB belum merata dan dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan

ekonomi serta pola investasi daerah. Sebagai contoh, penelitian yang mengkaji perkembangan ketimpangan pembangunan sektor-sektor di Provinsi NTB menyingkap adanya disparitas yang nyata antara sektor primer, sekunder, dan tersier dalam struktur perekonomian daerah, yang turut memengaruhi akses ekonomi dan distribusi pendapatan masyarakat lokal (Abdiriyanto & Cita, 2021).

Gambar 1. 1 Gini Ratio Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 – 2024 (Indeks)



Sumber : (Badan Pusat Statistik 2026)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, perkembangan Gini Ratio Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Indonesia selama periode 2015–2024 menunjukkan pola yang relatif fluktuatif dengan tingkat ketimpangan yang berada pada kategori sedang. Pada tahun 2015, Gini Ratio NTB tercatat sebesar 0,344, lebih rendah dibandingkan Gini Ratio nasional yang sebesar 0,402. Pada tahun 2016, Gini Ratio NTB meningkat menjadi 0,358, namun masih berada di bawah tingkat ketimpangan nasional sebesar 0,397. Peningkatan berlanjut pada tahun 2017 menjadi 0,371, kemudian mencapai nilai tertinggi pada tahun 2018 sebesar 0,391, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan Gini Ratio nasional sebesar 0,389.

Kenaikan Gini Ratio NTB pada periode 2015–2018 menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di daerah tersebut cenderung meningkat. Kondisi ini dapat mengindikasikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun perekonomian daerah mengalami perkembangan, sebagian besar peningkatan pendapatan kemungkinan masih terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan.

Pada periode 2022–2024, Gini Ratio NTB cenderung mengalami penurunan meskipun masih berfluktuasi. Tahun 2022 tercatat sebesar 0,370, meningkat sedikit pada tahun 2023 menjadi 0,374, dan kembali menurun menjadi 0,364 pada tahun 2024. Pola yang sama juga terlihat pada tingkat nasional, yaitu sebesar 0,381 pada tahun 2022, meningkat menjadi 0,388 pada tahun 2023, dan turun menjadi 0,379 pada tahun 2024. Penurunan Gini Ratio pada akhir periode penelitian menunjukkan adanya indikasi perbaikan distribusi pendapatan baik di NTB maupun secara nasional.

Secara keseluruhan, selama periode 2015–2024, tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung berada di bawah tingkat ketimpangan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di NTB relatif lebih merata dibandingkan rata-rata nasional. Meskipun demikian, nilai Gini Ratio yang masih berada pada kisaran 0,36–0,39 mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan masih termasuk dalam kategori sedang, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

Secara umum, grafik tersebut memperlihatkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi NTB tidak bergerak secara linier, melainkan mengalami

fase peningkatan hingga 2018, kemudian diikuti oleh periode fluktuasi dan penurunan bertahap hingga 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di NTB belum sepenuhnya konsisten dalam menciptakan pemerataan pendapatan.

Jika dibandingkan dengan kondisi ketimpangan pendapatan pada tingkat nasional Indonesia, dinamika yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan perbedaan yang cukup jelas. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, Gini Ratio nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung bergerak lebih stabil dengan kecenderungan penurunan secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa secara agregat, distribusi pendapatan di Indonesia mengalami perbaikan meskipun masih berada pada kategori ketimpangan sedang.

Berbeda dengan kondisi tersebut, Gini Ratio di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan pola yang lebih fluktuatif. Kenaikan yang cukup signifikan hingga tahun 2018 serta pergerakan yang tidak stabil pada tahun-tahun berikutnya mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di daerah ini masih sangat dipengaruhi oleh dinamika struktur ekonomi regional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ketimpangan di tingkat daerah cenderung lebih sensitif terhadap perubahan sektor ekonomi dibandingkan dengan kondisi nasional yang memiliki struktur ekonomi lebih beragam.

Selain itu, jika dilihat dari karakteristik struktur ekonomi, perekonomian nasional Indonesia ditopang oleh berbagai sektor seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa yang relatif lebih merata kontribusinya. Sementara itu, struktur ekonomi NTB masih sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan

penggalian, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terdistribusi secara merata kepada masyarakat.

Dinamika ketimpangan pendapatan di suatu wilayah tidak terlepas dari struktur ekonomi daerah tersebut. Sektor-sektor ekonomi yang menjadi penggerak utama pertumbuhan dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, struktur perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB daerah.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat (2025), perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024 tumbuh sebesar 5,30 persen, dengan sektor pertambangan dan penggalian menjadi lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 11,66 persen. Besarnya pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa sektor pertambangan masih memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perekonomian daerah. Bahkan, tanpa kontribusi sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya mencapai 3,87 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat masih sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan, sehingga sektor tersebut menjadi salah satu variabel yang relevan untuk dikaji dalam penelitian mengenai ketimpangan pendapatan.

Salah satu faktor yang diduga memiliki peran penting dalam dinamika tersebut adalah struktur perekonomian NTB yang sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Sektor ini merupakan salah satu kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB dan berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bahkan, kontribusi sektor

pertambangan sering kali menjadi penentu utama tinggi atau rendahnya laju pertumbuhan ekonomi NTB secara agregat.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai faktor-faktor yang memengaruhi dinamika ketimpangan pendapatan di NTB. Mengingat struktur ekonomi NTB yang sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan serta meningkatnya arus investasi dalam satu dekade terakhir, maka perlu dianalisis lebih lanjut apakah sektor pertambangan dan investasi berkontribusi terhadap peningkatan atau justru penurunan ketimpangan pendapatan. Selain itu, kualitas pembangunan manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga diduga memiliki peran dalam menentukan distribusi pendapatan di daerah (Febriyani & Ali, 2021).

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan negara. Bagian pertambangan merupakan salah satu bagian potensial yang dapat meningkatkan nilai perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga dapat meningkatkan tingkat lapangan pekerjaan. Meningkatnya produk Domestik Bruto suatu daerah dapat memajukan perekonomian negara dengan begitu jika suatu sektor yang berada di regional meningkat atau tumbuh pesat maka hal tersebut juga akan menguntungkan bagi negara (Leanado & Yasin, 2023).

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, khususnya pada sektor pertambangan dan penggalian. Keberadaan sumber daya mineral seperti tembaga dan emas menjadikan sektor pertambangan sebagai salah satu sektor strategis dalam perekonomian daerah. pertambangan di wilayah ini sebagian besar terkonsentrasi di wilayah Pulau Sumbawa yang dikenal sebagai kawasan

dengan potensi tambang mineral yang signifikan. Salah satu perusahaan yang beroperasi dalam kegiatan pertambangan di wilayah tersebut adalah PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang mengelola tambang tembaga dan emas di kawasan Batu Hijau.

Perkembangan sektor pertambangan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pertambangan dan penggalian menjadi salah satu penyumbang utama dalam struktur ekonomi daerah. Tingginya kontribusi sektor ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional serta meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, M.M., menjelaskan, bahwa sektor pertambangan memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian daerah, menempati posisi kedua setelah sektor pertanian. Tambang adalah sektor dengan kontribusi terbesar kedua setelah pertanian terhadap PDRB NTB. Karena kontribusinya besar, maka setiap gejolak di sektor tambang sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kajian ekonomi pembangunan, kondisi tersebut sering dikaitkan dengan fenomena ketimpangan distribusi pendapatan di daerah yang kaya sumber daya alam. Penelitian oleh Jeffrey D. Sachs dan Andrew M. Warner menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam cenderung menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan ekonomi. Mereka menyatakan bahwa "Negara-negara yang memiliki sumber daya alam melimpah sering kali mengalami pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang lebih lambat serta tingkat ketimpangan yang lebih

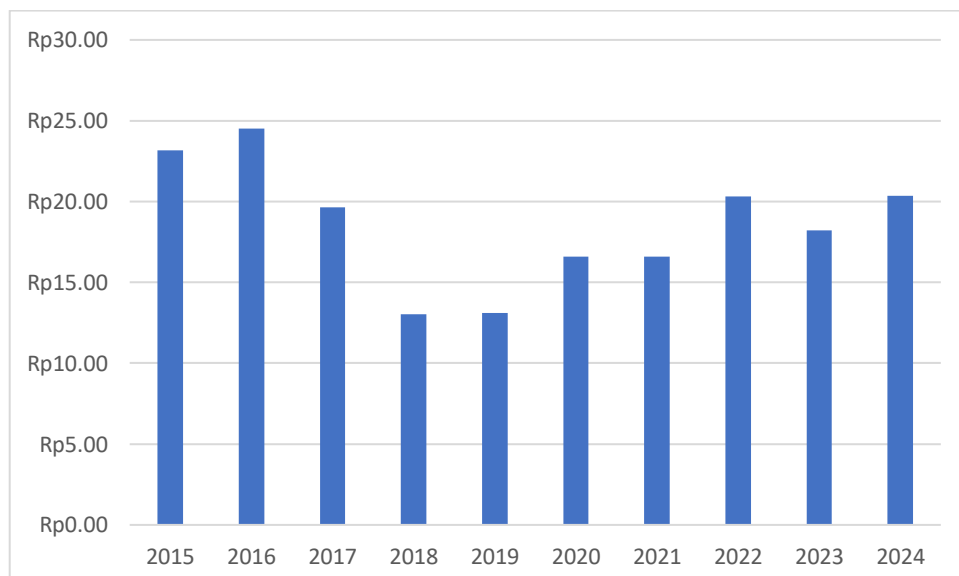
tinggi, yang disebabkan oleh lemahnya keterkaitan antara sektor sumber daya alam dengan sektor-sektor lain dalam perekonomian” (Davis, 2013).

Karakteristik tersebut juga tercermin pada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor pertambangan, salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik ekonomi yang relevan dengan tujuan penelitian. NTB merupakan salah satu daerah penghasil mineral logam strategis di Indonesia dengan keberadaan Tambang Batu Hijau di Kabupaten Sumbawa Barat yang dikelola oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Tambang Batu Hijau dikenal sebagai salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia, sedangkan Proyek Elang yang berada dalam wilayah konsesi yang sama merupakan salah satu cadangan tembaga dan emas porfiri terbesar yang belum dikembangkan di dunia (PT Amman Mineral Internasional Tbk., 2024). Besarnya potensi sumber daya mineral tersebut menjadikan sektor pertambangan dan penggalan sebagai salah satu sektor utama yang menopang perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (PT Amman Mineral Internasional Tbk., 2024).

Besarnya kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah belum tentu diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji apakah sektor pertambangan dan investasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025). Selain karakteristik tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu tingginya sektor pertambangan dan investasi yang belum selalu diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

Kondisi tersebut menjadikan NTB sebagai wilayah yang relevan untuk mengkaji apakah sektor pertambangan dan investasi benar-benar berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik ekonomi yang sesuai dengan tujuan penelitian serta mampu merepresentasikan fenomena yang ingin dianalisis. Namun demikian, besarnya kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah belum tentu diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji apakah sektor pertambangan dan investasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Gambar 1. 2 PDRB Pertambangan NTB Berdasarkan ADHK tahun 2015 – 2024 (Milyar Rupiah)



Sumber : (Badan Pusat Statistik 2025)

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sektor pertambangan di Nusa Tenggara Barat selama periode 2015–2024, terlihat bahwa sektor pertambangan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Perubahan tersebut mencerminkan dinamika sektor

produksi pertambangan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi produksi, ekspor mineral, serta kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Grafik pada Halaman 12 perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2015–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2015, nilai PDRB ADHK sektor pertambangan tercatat sebesar Rp23,15 triliun. Nilai tersebut kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi Rp24,50 triliun, yang menunjukkan bahwa sektor pertambangan masih menjadi salah satu sektor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada periode tersebut.

Namun, setelah tahun 2016 sektor pertambangan mengalami penurunan yang cukup tajam. Pada tahun 2017 nilai PDRB ADHK sektor pertambangan turun menjadi Rp19,64 triliun, kemudian kembali menurun pada tahun 2018 menjadi Rp13,02 triliun dan relatif stabil pada tahun 2019 sebesar Rp13,12 triliun. Penurunan yang terjadi selama periode ini dapat mengindikasikan adanya perlambatan produksi sektor pertambangan, perubahan volume ekspor komoditas mineral, maupun pengaruh kondisi pasar komoditas global yang berdampak terhadap kinerja sektor pertambangan di NTB.

Memasuki periode 2020 hingga 2022, sektor pertambangan kembali menunjukkan tren pemulihan. Pada tahun 2020 nilai PDRB ADHK meningkat menjadi Rp16,61 triliun, kemudian sedikit meningkat menjadi Rp16,59 triliun pada tahun 2021, dan melonjak cukup signifikan pada tahun 2022 hingga mencapai Rp20,33 triliun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan mulai kembali berkembang setelah mengalami penurunan pada beberapa tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pada tahun 2023 nilai PDRB ADHK sektor pertambangan kembali mengalami penurunan menjadi Rp18,22 triliun. Meskipun demikian, pada tahun 2024 sektor ini kembali menunjukkan kinerja positif dengan meningkatnya nilai PDRB ADHK menjadi Rp20,34 triliun. Kenaikan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas produksi dan kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah.

Secara keseluruhan, perkembangan PDRB ADHK sektor pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2015–2024 menunjukkan karakteristik yang fluktuatif. Kondisi ini mencerminkan bahwa sektor pertambangan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat produksi, harga komoditas mineral di pasar internasional, kebijakan pengelolaan sumber daya alam, serta kondisi perekonomian global. Meskipun mengalami beberapa kali penurunan, sektor pertambangan tetap menjadi salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sektor pertambangan memiliki peranan penting dalam struktur perekonomian Provinsi NTB. Besarnya kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB menunjukkan bahwa sektor pertambangan menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, dominasi sektor pertambangan juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana dampaknya terhadap distribusi pendapatan masyarakat.

Besarnya kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pertambangan tidak hanya berpengaruh terhadap peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), tetapi juga berpotensi memengaruhi distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena sektor pertambangan umumnya bersifat padat modal dan seringkali terkonsentrasi pada wilayah tertentu, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak selalu tersebar secara merata di seluruh lapisan masyarakat (Detik.com, 2025).

Selanjutnya, untuk memahami lebih dalam mengenai peran sektor pertambangan dalam perekonomian daerah, perlu diketahui bahwa sektor pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat didominasi oleh beberapa jenis komoditas utama. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, khususnya pada sektor pertambangan mineral logam seperti emas dan tembaga. Kegiatan pertambangan ini sebagian besar berlokasi di Pulau Sumbawa yang dikenal sebagai kawasan dengan cadangan mineral yang signifikan di Indonesia.

Salah satu sektor pertambangan terbesar di wilayah ini berada di kawasan Batu Hijau yang merupakan tambang tembaga dan emas berskala besar. Keberadaan tambang ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Namun demikian, karakteristik sektor ini yang bersifat padat modal menyebabkan manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak selalu terdistribusi secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat (Detik.com, 2025).

Selain pertambangan mineral logam, Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki potensi pertambangan non-logam dan batuan, seperti pasir, batu kapur, batu apung, serta bahan galian C lainnya yang banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan konstruksi dan pembangunan infrastruktur. Sektor pertambangan jenis ini umumnya berskala lebih kecil dan tersebar di berbagai wilayah, sehingga

memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pertambangan mineral logam yang berskala besar.

Penelitian oleh Jeffrey D. Sachs dan Andrew M. Warner menunjukkan bahwa daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam cenderung menghadapi tantangan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini disebabkan karena sektor pertambangan seringkali memiliki keterkaitan yang terbatas dengan sektor ekonomi lainnya sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak sepenuhnya tersebar secara merata.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertambangan memiliki peranan penting dalam struktur perekonomian Provinsi NTB. Besarnya kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB menunjukkan bahwa sektor pertambangan menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, dominasi sektor pertambangan juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana dampaknya terhadap distribusi pendapatan masyarakat.

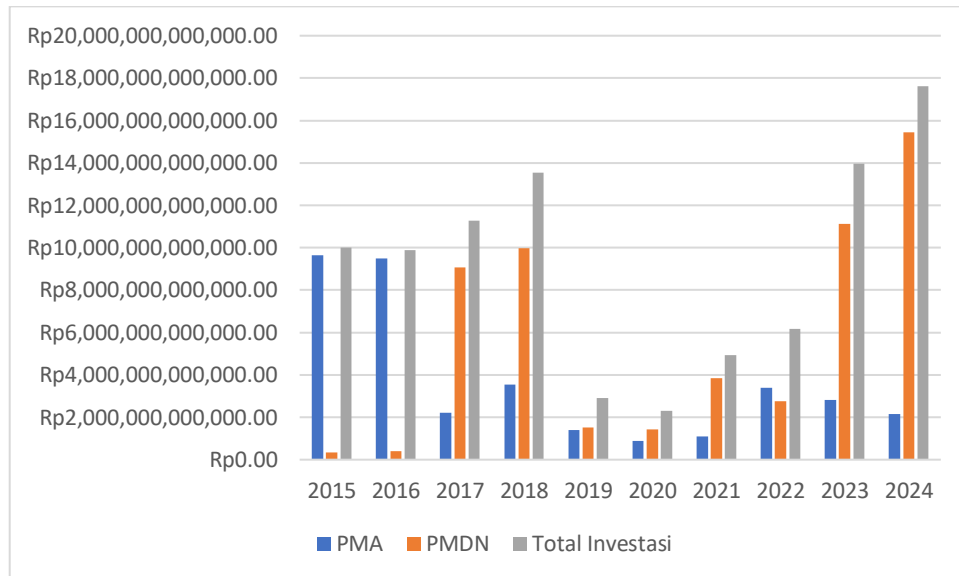
Besarnya kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. sektor pertambangan tidak hanya berpengaruh terhadap peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga berpotensi memengaruhi distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena sektor pertambangan umumnya bersifat padat modal dan seringkali terkonsentrasi pada wilayah tertentu, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak selalu tersebar secara merata di seluruh lapisan masyarakat (Detik.com, 2025)

Namun demikian, perkembangan sektor pertambangan tidak dapat dilepaskan dari peran investasi sebagai salah satu faktor penting dalam aktivitas pembangunan ekonomi daerah. Investasi merupakan sumber pembiayaan utama dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi, termasuk sektor pertambangan. Melalui investasi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, kegiatan eksplorasi, produksi, serta pengembangan infrastruktur pertambangan dapat dilakukan secara lebih optimal.

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, masuknya investasi dalam berbagai sektor ekonomi, khususnya sektor pertambangan, telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Investasi tersebut dapat berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang keduanya berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka peluang kerja bagi masyarakat. Akan tetapi, peningkatan investasi tidak selalu diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan, sehingga dalam beberapa kondisi justru dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat.

Nangarumba, (2015) menemukan bahwa variabel investasi memiliki pengaruh yang signifikan serta berhubungan negatif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan investasi cenderung diikuti dengan penurunan ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Dengan demikian, untuk mendorong terciptanya pemerataan distribusi pendapatan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan investasi di berbagai sektor ekonomi.

Gambar 1. 3 Investasi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 – 2024
(Triliun Rupiah)



Sumber : (Portal Satu Data NTB, 2024)

Berdasarkan data investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2015–2024, investasi terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menunjukkan perkembangan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada awal periode penelitian, realisasi PMA berada pada tingkat yang relatif tinggi, yaitu sekitar Rp9,65 triliun pada tahun 2015 dan Rp9,49 triliun pada tahun 2016. Namun, pada tahun 2017 investasi PMA mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi sekitar Rp2,21 triliun. Setelah itu, nilai PMA kembali mengalami fluktuasi hingga mencapai sekitar Rp9,65 triliun pada tahun 2024. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa investasi asing di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi perekonomian global, harga komoditas, kebijakan investasi, serta realisasi proyek-proyek berskala besar.

Sementara itu, investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga menunjukkan perkembangan yang dinamis. Nilai PMDN pada tahun 2015 tercatat

sekitar Rp347,85 miliar, kemudian meningkat secara signifikan pada beberapa tahun berikutnya. Peningkatan yang cukup besar terjadi pada tahun 2022 hingga 2024, dengan nilai PMDN mencapai sekitar Rp15,45 triliun pada tahun 2022, sekitar Rp1,35 triliun pada tahun 2023, dan kembali meningkat pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan semakin besarnya peran investor domestik dalam mendukung pembangunan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui berbagai sektor usaha.

Dalam penelitian ini, variabel investasi diukur menggunakan total realisasi PMA dan PMDN sebagai representasi keseluruhan penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan akumulasi kedua jenis investasi tersebut, total investasi selama periode 2015–2024 menunjukkan pola yang berfluktuasi. Total investasi tercatat sebesar Rp10,20 triliun pada tahun 2015, sedikit menurun menjadi Rp9,90 triliun pada tahun 2016, kemudian meningkat menjadi Rp11,28 triliun pada tahun 2017. Selanjutnya, total investasi mengalami penurunan hingga sekitar Rp2,31 triliun pada tahun 2018 sebelum kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Nilai investasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp17,70 triliun, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp2,31 triliun. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih dipengaruhi oleh berbagai kondisi ekonomi dan kebijakan investasi. Mengingat investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, perubahan realisasi investasi diduga turut memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, investasi menjadi salah satu variabel yang dianalisis dalam penelitian ini.

Secara keseluruhan, perkembangan investasi PMA dan PMDN di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2015–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Meskipun investasi asing mengalami beberapa kali penurunan, investasi domestik menunjukkan kecenderungan meningkat terutama pada akhir periode pengamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Peningkatan investasi tidak selalu secara otomatis berdampak pada pemerataan pendapatan masyarakat. Dalam beberapa kasus, investasi yang terpusat pada sektor atau wilayah tertentu justru dapat menimbulkan ketimpangan pendapatan antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, meskipun investasi terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), penelitian ini menggunakan total realisasi PMA dan PMDN sebagai variabel investasi untuk merepresentasikan keseluruhan penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sektor pertambangan dan investasi merupakan dua faktor yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan sektor pertambangan yang didukung oleh arus investasi, baik investasi domestik maupun asing, dapat meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan nilai tambah ekonomi, serta mendorong peningkatan pendapatan daerah. Namun demikian, peningkatan ekonomi yang bersumber dari pertambangan dan investasi tidak

selalu secara langsung diikuti oleh pemerataan kesejahteraan masyarakat (Prabowo & Ardiani, 2024).

Dalam banyak kasus pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali belum mampu memberikan dampak yang merata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi semata, tetapi juga oleh faktor pembangunan manusia yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah.

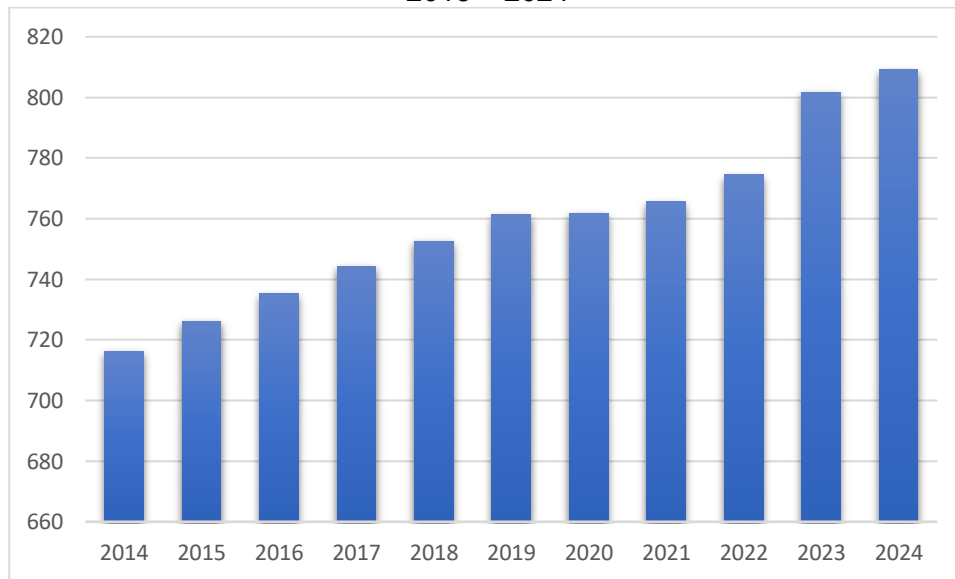
Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik. IPM menggambarkan capaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Tingginya nilai IPM menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.

Dalam konteks ketimpangan pendapatan, tingkat pembangunan manusia dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Daerah dengan tingkat pembangunan manusia yang lebih tinggi cenderung memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik sehingga mampu berpartisipasi secara lebih optimal dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, apabila kualitas sumber daya manusia masih rendah, maka peluang masyarakat untuk memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi menjadi lebih terbatas.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai variabel kontrol untuk melihat bagaimana kualitas

pembangunan manusia dapat mempengaruhi hubungan antara sektor pertambangan dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Gambar 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 – 2024



Sumber : (Badan Pusat Statistik NTB, 2025)

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2014–2024 menunjukkan tren yang terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai IPM meningkat dari 65,19 pada tahun 2014 menjadi 73,10 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya perbaikan kualitas pembangunan manusia yang ditunjukkan melalui peningkatan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak masyarakat.

Meskipun sempat mengalami perlambatan pada masa pandemi Covid-19, nilai IPM tetap menunjukkan peningkatan hingga tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengalami perkembangan. Dalam penelitian ini, IPM digunakan sebagai variabel kontrol karena kualitas pembangunan manusia diduga turut

memengaruhi hubungan antara sektor pertambangan, investasi, dan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, pengendalian pengaruh IPM diperlukan agar pengaruh variabel utama terhadap ketimpangan pendapatan dapat dianalisis secara lebih akurat.

Secara keseluruhan, perkembangan IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2015–2024 menunjukkan tren yang positif dan terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut semakin membaik dari waktu ke waktu. Peningkatan IPM juga menjadi indikator penting bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi telah memberikan hasil yang cukup baik dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam konteks penelitian ini, IPM digunakan sebagai variabel kontrol karena tingkat pembangunan manusia dapat mempengaruhi hubungan antara investasi, aktivitas ekonomi sektoral, dan ketimpangan pendapatan. Daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kualitas kesehatan yang lebih baik, serta standar hidup yang lebih layak cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang dihasilkan oleh investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa IPM memiliki hubungan yang erat dengan ketimpangan pendapatan. Penelitian oleh Mahbub ul Haq yang memperkenalkan konsep IPM bersama United Nations Development Programme menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup manusia. Selain itu, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga membantu memperkecil kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat.

Oleh karena itu, dalam penelitian mengenai pengaruh sektor pertambangan dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, variabel IPM menjadi penting untuk dimasukkan sebagai variabel kontrol. Hal ini bertujuan agar analisis yang dilakukan dapat mempertimbangkan pengaruh kualitas pembangunan manusia dalam menjelaskan dinamika ketimpangan pendapatan di daerah Nusa Tenggara Barat.

Beberapa penelitian empiris juga menunjukkan adanya hubungan antara pembangunan manusia dan ketimpangan pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Febriyani dan Anis menunjukkan bahwa pembangunan manusia memiliki pengaruh terhadap distribusi pendapatan karena peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan yang lebih baik. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam analisis ketimpangan pendapatan.

IPM dipilih sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini karena indikator ini mampu merepresentasikan kualitas sumber daya manusia yang secara tidak langsung mempengaruhi hubungan antara sektor pertambangan, investasi, dan ketimpangan pendapatan. Dengan memasukkan IPM sebagai variabel kontrol, diharapkan hasil analisis penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih

komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penelitian mengenai ketimpangan pendapatan telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti, baik pada tingkat nasional maupun regional. Sebagian besar penelitian tersebut menitikberatkan pada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Dalam kajian ekonomi pembangunan, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan sering dijelaskan melalui hipotesis kurva Kuznets yang menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi ketimpangan cenderung meningkat sebelum akhirnya menurun pada tahap pembangunan yang lebih maju (Ana et al, 2017).

Beberapa penelitian empiris di Indonesia juga telah menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kemiskinan, serta pembangunan manusia. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa berbagai faktor ekonomi dan sosial dapat mempengaruhi distribusi pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada variabel makroekonomi secara umum dan belum secara spesifik mengkaji peran sektor ekonomi tertentu dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan (Sirtama, 2021).

Di sisi lain, sektor pertambangan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian beberapa daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. sektor pertambangan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus meneliti pengaruh sektor pertambangan terhadap ketimpangan pendapatan masih relatif terbatas, terutama pada tingkat daerah.

Selain itu, investasi juga merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah. Investasi dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun dalam beberapa kondisi, peningkatan investasi tidak selalu diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan, khususnya apabila dikaitkan dengan sektor pertambangan yang menjadi salah satu sektor unggulan di suatu daerah.

Di samping faktor ekonomi tersebut, kualitas pembangunan manusia juga dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu wilayah (Febriyani & Ali, 2021). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan kualitas sumber daya manusia melalui dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Wilayah dengan tingkat pembangunan manusia yang lebih tinggi cenderung memiliki masyarakat yang lebih mampu berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi sehingga berpotensi mempengaruhi distribusi pendapatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai ketimpangan pendapatan telah banyak dilakukan, namun masih terdapat keterbatasan dalam kajian yang secara khusus mengkaji hubungan antara sektor pertambangan dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan dengan mempertimbangkan faktor pembangunan manusia. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan tersebut di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan data periode 2015–2024 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak sektor pertambangan dan

investasi terhadap ketimpangan pendapatan dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel kontrol di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa ketimpangan pendapatan masih menjadi salah satu permasalahan dalam pembangunan ekonomi daerah, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Meskipun aktivitas ekonomi di daerah ini terus berkembang, khususnya melalui kontribusi sektor pertambangan dan peningkatan investasi, namun peningkatan aktivitas ekonomi tersebut tidak selalu diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Di sisi lain, kualitas pembangunan manusia yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia juga berperan penting dalam menentukan sejauh mana masyarakat dapat memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pengaruh sektor pertambangan dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan dengan mempertimbangkan peran Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel kontrol. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak sektor pertambangan dan investasi terhadap ketimpangan pendapatan dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel kontrol di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2015–2024.

1.2. Rumusan Masalah

Oleh karena itu, untuk memahami hubungan antara aktivitas ekonomi dan ketimpangan pendapatan di daerah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sektor pertambangan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015–2024?

2. Apakah investasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015–2024?
3. Apakah sektor pertambangan dan investasi secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015–2024 dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel kontrol?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh sektor pertambangan terhadap ketimpangan .
2. Menganalisis pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015–2024.
3. Menganalisis pengaruh sektor pertambangan dan investasi secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015–2024 dengan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel kontrol.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai pengaruh sektor pertambangan, investasi, serta Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih merata, terutama dalam pengelolaan sektor pertambangan dan peningkatan investasi.

b) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan akademisi dalam memahami hubungan antara sektor pertambangan, investasi, dan ketimpangan pendapatan.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa, serta dapat dikembangkan dengan variabel atau metode yang berbeda.

1.5. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh sektor pertambangan, investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan Gini Ratio.
2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sektor pertambangan dan investasi, sedangkan IPM digunakan sebagai variabel kontrol.
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat dan instansi terkait lainnya.

4. Data yang digunakan merupakan data time series pada periode tertentu (disesuaikan dengan ketersediaan data penelitian).
5. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
6. Penelitian ini tidak membahas faktor-faktor lain di luar variabel yang telah ditentukan, seperti faktor kebijakan pemerintah secara spesifik, kondisi politik, maupun faktor eksternal lainnya.